

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Andrian Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama. PT Alumni, Bandung, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Budiman Rusli. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Hakim Publishing. Cimahi Bandung, 2013.
- Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. Pertama Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hardiansyah. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia. Bandung, 2019
- Islamy, Irfan. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bina Aksara, Jakarta, 2009
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Munir Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi*, cetakan kelima, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011

Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2002.

B. JURNAL

Agus Tri Indah, “Pengaruh Keterampilan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja Pada Sub Bagian Evaluasi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Jakarta”, *Jurnal* Vol. 1, No. 2. Jakarta Timur: BSI, 2017.

Arum Tarina, “Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil”. Prodi Sarjana Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis & Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa. *Jurnal Pelita Ilmu* Vol. 14 No. 2, Oktober 2020.

Faedlulloh, D. Implementasi Undang -Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi yang Inkonstitusional. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 2(2). 2016.

Falahudin, Aldri Frinaldi, “Reformasi Birokasi Dalam Pelayanan Publikada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang”, *Jurnal Teori dan Praktek Administrasi Publik*, Volume IV, Nomor 1 2020.

Herman, Abdul Razak, dan Marwati Riza, “Gagasan Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Medis sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2020

Joni Dawud, dkk, “Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)”, *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol 12 No. 2 Desember 2020.

Iqbal Fitra Assegaf, Muhammad dkk, “Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmtsp) Jawa Tengah”, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019.

- I Made Arya Utama, “Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan”, *Jurnal*. Universitas Padjajaran, Bandung, 2005.
- Maria Magdalena., dkk, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Memajukan Pelaku Usaha, *Jurnal*. Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.
- Nola Alfiya. “Hubungan Perizinan Online Single Submission (OSS) Dengan Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Banda Aceh”, *Jurnal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2020.
- Rila Kusumaningsih dkk. Pelayanan Perizinan Pada Lembaga Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Serang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Universitas Sultan Ageng. *Jurnal*. Volume 8, Nomor 2 September 2021.
- Rizky P Aritionang, “Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kota Medan 2017-2019 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Suend .R. H. Saragih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk-M) Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2021.
- Shandy, I & Dessy A. OSS dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal*. Universitas Sumatra Medan.
- Seto Sanjoyo dkk, “Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investas”, *Jurnal Borneo Law Review* Vol 4 No. ISSN : 2580-6742, 2020.
- Sintya Farah & Retno Sunu A. “Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui Oss (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kota Semarang”, *Jurnal*. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Muwasiq M.Noor, "Konsepsi Teknis dan Reformasi Ijin Online Single Submission (OSS) Perpres 91/2017", Aceh: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2018.

Maria Magdalena, Gloria Gita Putri & M Erwin, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Memajukan Pelaku Usaha, Skripsi, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

U Biridlo'i Robby & Wiwin Tarwini, "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kabupaten Bekasi", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Administration*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019.

Wisnu Aryo Dewanto, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Yang di PHK", *Jurnal Panorama Hukum* Volume 5 Nomor. 1 Tahun 2020.

C. UNDANG-UNDANG

Anonim, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 1 Ayat (5).

Laporan Kinerja (LKJ) DPMPTSP Provinsi Jambi, Tahun 2020

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS Untuk Pelaku Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Jakarta, 2018.

D. INTERNET

<https://www.dslalawfirm.com/omnibus-law/> Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: Pengertian, Tujuan, dan Manfaat. Diakses tgl 14 Januari 2022.

Dpmptsp.jambiprov.go.id

